



## Implementasi Program Subsidi Solar Koperasi Untuk Nelayan (SOLUSI) Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan (Studi Kasus : Desa Palu Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang)

Ageng Prayoga<sup>1</sup> , Muhammad Husni Thamrin<sup>2</sup> ,

<sup>1</sup>Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Sumatera Utara Medan, 20155 Indonesia

\*Corresponding Author: [agengprayoga18@gmail.com](mailto:agengprayoga18@gmail.com)

### INFO PASAL

#### Log Artikel:

Received: 15 Mei 2023

Revised: 25 Mei 2023

Accepted: 02 Juni 2023

Tersedia online:

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana>

E-ISSN:xxx

P-ISSN:xxx

Ageng Prayoga & Muhammad Husni Thamrin (2023) Kinerja Badan Pertahan Nasional Dalam Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Tapanuli Utara. *Sajjana: Public Administration Review*

### ABSTRAK

Implementasi program subsidi solar mengeksplorasi tingkat penerimaan subsidi solar, meningkatkan pendapatan nelayan, serta factor – factor yang memengaruhi penerimaan serta dampak program dalam meningkatkan kondisi social ekonomi nelayan.. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi program subsidi solar dalam meningkatkan pendapatan nelayan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dinas Perikanan dan Kelautan dalam menjalankan implementasi program subsidi solar belum mampu untuk meningkatkan pendapatan nelayan di Desa Paluh Sibaji. Hal ini dapat diukur menggunakan indikator implementasi program menurut George Edwards III (1980) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program penerimaan subsidi solar di kalangan nelayan Desa Paluh Sibaji belum membangun komunikasi yang baik dalam sosialisasi dan interaksi kepada peserta program nelayan sehingga masih belum tepat sasaran (paling banyak penerima program subsidi solar yang didapatkan oleh toke/suplly). Dalam struktur birokrasi Mekanisme dan prosedur buku Paduan yang terkait tidak ada sehingga dengan pelaksanaan dan pengawasan program subsidi solar bagi nelayan di Desa Paluh Sibaji belum mampu untuk mencapai sasaran dengan maksimal.

**Kata kunci:** Subsidi solar, nelayan, implementasi program, dampak

### ABSTRACT

The implementation of the diesel subsidy program explores the level of acceptance of diesel subsidies, increasing fishermen's income, as well as factors that influence acceptance and the impact of the program in improving the socio-economic conditions of fishermen. This research was conducted to find out how the implementation of the diesel subsidy program increases fishermen's income. This research uses qualitative research methods by conducting interviews, observation, documentation and literature study. The results of this research indicate that the Fisheries and Maritime Service in implementing the diesel subsidy program has not been able to increase the income of fishermen in Paluh Sibaji Village. This can be measured using program implementation indicators according to George Edwards III (1980). The results of this research show that the implementation of the diesel subsidy receipt program among fishermen in Paluh Sibaji Village has not yet developed good communication in socialization and interaction with fishermen program participants so it is still not on target ( Most of the recipients of the diesel subsidy program are obtained by toke/supply. In the bureaucratic structure the relevant Paduan book mechanisms and procedures do not exist so that the implementation and supervision of the diesel subsidy program for fishermen in Paluh Sibaji Village has not been able to achieve maximum targets.

**Key words:** Diesel subsidies, fishermen, program implementation, impact



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

## **1. Latar Belakang**

Nelayan merupakan salah satu bagian dari masyarakat Indonesia yang identik dengan masyarakatnya yang hidup di daerah pesisir dengan mengelola potensi sumberdaya perikanan. Nelayan juga merupakan orang yang mata pencariannya menangkap ikan. Dari banyaknya masyarakat nelayan di Indonesia menangkap ikan dengan menggunakan bantuan kapal tradisional dengan alat sederhana untuk mendapatkan ikan tanpa merusak ekosistem alam. Pernyataan ini di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang kapal yang berukuran diatas dari ukuran 30 GT tidak di izinkan untuk menerima BBM solar bersubsidi, yang berarti bisnis dengan kapal yang ukurannya diatas dari ukuran 30 GT harus membeli dan menggunakan bahan bakar dengan harga ekonomis.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti pada pra penelitian sebagai tahap awal dalam mendeskripsikan permasalahan program solar koperasi untuk nelayan. Bahwa para nelayan sangat sulit dan jauh dari tangkalan kapal dalam mengakses bahan bakar solar, pada sektor keuangan nelayan masih kurang dalam akses permodalan untuk biaya operasional melaut, bahwasannya ada pemanfaatan solar oleh pihak yang seharusnya tidak berhak untuk menerimanya, dan kurang pengetahuan mengenai pemanfaatan pendapatan untuk pengembangan usaha

Fakta tersebut tidak hanya terjadi pada nelayan di kabupaten Deli Serdang kecamatan Pantai labu desa Palu Sibaji saja, tetapi juga menjadi permasalahan umum utama di kalangan nelayan di Indonesia, khususnya kekurangan dan mahalnya bahan bakar minyak (BBM) yang merupakan kebutuhan pokok nelayan sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu merumuskan Langkah – Langkah pengambilan kebijakan agar nelayan kecil tidak berada dalam situasi yang lebih buruk. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan merumuskan strategi yang dapat mempengaruhi penghidupan atau kesejahteraan nelayan, , meningkatkan pendapatan nelayan,

## **2. Metode Penelitian**

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Menurut Sugiyono, (2017:19). Menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data, bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkontruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

Data ini didapatkan melalui sumber data primer dan sekunder Sugiyono, (2017:101). Dimana data primer diperoleh dari survei, observasi dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu, dokumen resmi, basis data public, dan melalui media internet.

### *2.1 Lokasi Penelitian*

Menurut Sugiono (2015:207) menyatakan bahwa dalam hal lokasi penelitian perlu dikemukakan tempat atau lokasi dimakakan situasi sosial akan diteliti. Adapun lokasi penelitian dilakukan Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.

### *2.2 Sumber Data dan Teknis Pengumpulan Data*

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dimana data primer diperoleh dari survey, observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu, dokumen resmi, basis data public, dan melalui internet.

### 2.3 Penentuan Informan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik purposive sampling dalam penentuan Informan kunci memiliki pengetahuan khusus mengenai orang lain, proses, maupun peristiwa secara terperinci dibandingkan orang lain, dan merupakan sumber data yang paling berharga bagi peneliti. Dalam mengumpulkan data yang akurat, maka peneliti memilih informan dengan menggunakan teknik Purposive sampling, di mana peneliti sudah menentukan siapa saja yang akan diwawancarai dengan pertimbangan tertentu. Lebih lanjut Sugiyono (2016:368) menyatakan bahwa purposive sampling adalah Teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan dapat tertentu serta dapat memperoleh informasi yang jelas, dapat atas jawaban dalam menjawab berbagai pertanyaan dari peneliti yang kemudian hasil data ini bisa menjadi masukan ataupun solusi dari masalah.

### 2.4 Teknis Analisis Data

Analisis data melibatkan pemeriksaan sistematis dan penyusunan transkrip wawancara, catatan lapangan, serta bahan relevan lainnya yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini teknis analisis data yang digunakan menggunakan metode yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:246) terdiri dari :

#### 1. Reduksi Data

Reduksi Data Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, karena semakin lama peneliti ke lapangan akan semakin banyak jumlah datanya, kompleks dan rumit. Data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang jelas untuk peneliti, sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya.

#### 2. Penyajian Data

Data yang disajikan oleh peneliti dilakukan dalam bentuk uraian singkat dari hasil wawancara yang dilakukan, tabel, hubungan antar kategori yang disesuaikan dengan reduksi yang telah ditentukan. Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah daengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja sebelumnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

#### 3. Penarikan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

### 2.5 Teknik Keabsahan Data

Sugiyono (2015: 269), menjelaskan bahwa teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat beberapa macam triangulasi diantaranya :

1. Triangulasi Sumber  
Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber data yang telah dianalisis oleh sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.
2. Triangulasi Teknik  
Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan Teknik berbeda.
3. Triangulasi Waktu, yaitu mengecek data yang diperoleh di waktu yang berbeda sehingga akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### 1.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena berkomunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan menggunakan sarana. tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Implementasi kebijakan akan berjalan secara lancar bila mereka lakukan. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana kebijakan atau implementor.

##### *1.1.1 Penyaluran komunikasi (transmisi)*

komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh para pihak yang menjalankan kebijakan Dinas Perikanan dan Kelautan karena sering kali kebijakan yang telah dibuat namun dalam implementasinya tidak berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Dengan kata lain, kebijakan yang ada harus mampu disampaikan dengan baik kepada para pihak yang menjalankan program tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan dan harus menjamin pemerataan penyampaian komunikasi akan kebijakan kepada semua yang menjalankan kebijakan sehingga tidak ada ketinggalan informasi serta pada akhirnya setiap Dinas Kelautan dan Perikanan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Maria selaku Staf Dinas Perikanan dan Kelautan mengatakan bahwa:

*“Program ini sudah lama diturunkan dari 2019 dari dinas, karena sejak saya masuk di kantor dinas perikanan di tahun 2020 program ini sudah diimplementasikan di desa Palu Sibaji, SPBUN berkah laut baru – baru ini aja di tahun 2023 dan SPBUN AKR sudah lama dari tahun 2019 tetapi punya swasta tidak punya pemerintah” (hasil wawancara tanggal 22 Mei 2024)*

Bahwasannya pihak dinas Perikanan dan Kelautan dan ketua program subsidi solar sudah bersosialisasi kepada masyarakat nelayan di Desa Palu Sibaji tentang adanya program subsidi solar dan sudah memberi tahu cara mekanisme untuk mendapatkan subsidi solarnya yaitu membawa KTP, membuat aplikasi My Pertamina untuk membuat barkot untuk mendapatkan subsidi solar untuk nelayan.

Sementara wawanacara Sugianto selaku peserta subsidi solar nelayan mengatakan bahwa :

*”Bahwasannya komunikasi tentang adanya program subsidi solar sudah jelas kepada masyarakat nelayan Desa Palu Sibaji dari dinas Perikanan dan Kelautan. Ketika sosialisasi kami pun juga dipanggil ke kantor desa dalam rapat tentang adanya program subsidi solar dan tata cara mekanisme pendaftaran untuk mendapatkan subsidi solar”*

Berdasarkan pernyataan diatas saat mewawancarai salah satu informan dapat diketahui bahwa komunikasi sudah jelas dan tersampaikan kepada nelayan dan dimanfaatkan oleh masyarakat adanya program subsidi solar dari pemerintah. Kemudian salah satu anggota nelayan pak Sugianto komunikasi adanya program subsidi solar sudah jelas, tentunya masyarakat nelayan yang lain sangat senang dan antusias dalam mengikuti semua peraturan dari Menteri BPH dan Migas, dinas Perikanan dan Kelautan dan pemerintah Desa tata cara pendaftaran mendapatkan subsidi solar untuk nelayan.

### 1.1.2 Kejelasan Komunikasi

Implementasi program subsidi solar sebagaimana mestinya maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas maka para implementor akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus melakukan. Ketidakjelasan pelaksanaan suatu kebijakan juga dapat terjadi karena ada pihak – pihak tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Maria selaku Staf Dinas Perikanan dan Kelautan mengatakan bahwa:

*“Program ini sudah lama diturunkan dari 2019 dari dinas, karena sejak saya masuk di kantor dinas perikanan di tahun 2020 program ini sudah diimplementasikan di desa Palu Sibaji, SPBUN berkah laut baru – – baru ini aja di tahun 2023 dan SPBUN AKR sudah lama dari tahun 2019 tetapi punya swasta tidak punya pemerintah” (hasil wawancara tanggal 22 Mei 2024)*

Terkait dengan pernyataan yang diberikan oleh staff dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Deli Serdang yang diwawancarai bahwa program di komunikasikan ke pemerintah Desa Palu Sibaji sudah lama diimplementasikan di SPBUN milik swasta tidak punya pemerintah. tetapi di tahun 2023 yang diimplementasikan di SPBUN berkah laut di tahun 2023.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Palu Sibaji mengatakan bahwa:

*“Terkait dengan program subsidi solar di desa palu sibaji ada dua SPBUN, pertama AKR dan berkah laut. Program ini khusus untuk nelayan dan dilakukan mediasi dan sosialisasi kepada masyarakat di kantor desa untuk pengambilan minyak solar harus ada rekomendasi dari dinas perikanan dan kelautan dan surat rekomendasi dari Kepala Desa. supaya pengambilan minyak supaya tidak tepat sasaran, karena subsidi para nelayan” (hasil wawancara tanggal 20 Mei 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Desa mengatakan dinas Perikanan dan Kelautan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah desa Palu Sibaji tentang adanya program subsidi solar koperasi untuk nelayan.

### 1.1.3 Konsisten Komunikasi

konsisten komunikasi mengandung arti bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila perintah pelaksanaan konsisten dan tidak berubah ubah. Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari implementor dalam memahami secara jelas dan benar akan pedoman yang dilaksanakan. Tingkat keefektifan implementasi kebijakan tergantung dari konsistensi dan kejelasan perintah pelaksanaannya.

Masalah kurangnya perhatian pemerintah kepada masyarakat yang memberikan penyampaian informasi tentang adanya program subsidi solar koperasi untuk nelayan untuk meningkatkan pendapatan nelayan ketika melaut dan perikanan keluarga. Dengan kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat nelayan serta keterbatasan media sosial di pedesaan sehingga masyarakat masih ada yang belum tau tentang adanya program subsidi solar untuk nelayan dari pemerintah desa maupun kabupaten untuk menyampaikan informasi secara keseluruhan dalam meningkatkan pendapatan nelayan.

## 2. Sumber Daya

### 2.1 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam sumber daya adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya implementasi kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung. Tersedianya sarana dan prasarana juga berkaitan dengan tugas – tugas yang ditetapkan karena setiap tugas tidak memiliki sarana dan prasarana dapat membuat implementasi kebijakan berjalan lambat dan sulit untuk direalisasikan.

Abdullah selaku masyarakat nelayan dusun 2 Desa Palu Sibaji mengatakan bahwa :

*“Untuk fasilitas saya cukup memadai dalam program ini, bila ada masalah pihak koperasi maupun pemerintah desa sudah berkontribusi dan minyak solar cukup memuaskan ketika membeli solar dan tempat SPBUN sangat dekat dan 2 sehingga untuk membelinya tidak terlalu lama” (hasil wawancara tanggal 2 Mei 2024).*

Dari pernyataan di atas keterangan informan di atas yang berkaitan dengan kunjungan lapangan maka dapat dipahami bahwa pada aspek ini dikatakan ada 2 subindikator dari beberapa informan yang menyampaikan bahwa pihak pemerintah sudah ada jelas dan belum mencukupi kunjungan di lapangan. Pertama 1) subindikator kecukupan dan memfasilitasi dan 2) sarana dan prasarana, menunjukkan bahwa dari subindikator yang disebutkan keseluruhan tersebut mengarah ke negative dan positive.

Indikator yang positive Dimana subindikator sarana dan prasarana yang lengkap seperti menyediakan aula kantor desa ketika sosialisasi pihak dinas perikanan dan kelautan tentang adanya program subsidi solar untuk nelayan. Kemudian subindikator yang negative pada mencukupi dan memfasilitasi, Dimana hal ini tersebut masih tergolong kurang baik bahkan jarang pihak dinas perikanan dan kelautan langsung turun ke lapangan untuk monitoring dan mengawasi program ini selama berjalan di lapangan.

## 3. Disposisi

Disposisi diartikan sebagai sikap para implementor untuk mengimplementasikan kebijakan. Di mana, jika para implementor bersikap baik, tegas, dan berkomitmen atau memiliki political will (kemauan politik) yang baik terhadap suatu kebijakan tertentu.

Untuk mengetahui kaitannya disposisi dalam implementasi kebijakan program subsidi solar untuk nelayan terhadap tingkat pendapatan nelayan. Maka berdasarkan hasil wawancara Maria selaku staf dinas Perikanan dan Kelautan mengatakan bahwa :

*“Sering, melalui pertemuan – pertemuan dengan para masyarakat nelayan dalam membuat surat rekomendasi pengambilan minyak solar dalam menyelesaikan masalah ini yang belum lengkap suratnya para nelayan” (hasil wawancara tanggal 22 Mei 2024)*

Sedangkan hasil wawancara Nasri selaku kepala desa Palu Sibaji mengatakan bahwa :

*“Dari pemerintah desa sangat membantu para nelayan ketika melakukan dan membuat surat rekomendasi dan membuat aplikasi My pertamina dalam bentuk barkot, karena masyarakat nelayan masih banyak yang belum pandai memakai Hp android sebagiannya” (hasil wawancara tanggal 20 Mei 2024)*

Setelah memperhatikan beberapa jawaban dari beberapa pertanyaan tentang disposisi para implementor, terlihat adanya komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas. Para implementor dalam satu sisi bersikap tegas namun disisi lain berusaha bijaksana dalam menghadapi situasi yang tidak ideal. Tetap berpegang aturan, namun membantu masyarakat dalam mengurus persyaratan dan administrasi perizinan rekomendasi dari dinas perikanan dan kelautan dan kepala desa. menyadari bahwa masyarakat yang kurang Pendidikan, kurang teknologi perlu dibimbing, dibina dan diawasi dalam pembuatan surat rekomendasi minyak subsidi solar di SPBUN supaya dalam kebijakan program ini berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

#### 4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi – organisasi swasta, institusi Pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus – kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerja sama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak bagus/kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksana kebijakan.



**Gambar 4.4 Kartu e -KUSUKA Nelayan**

Sumber: Data Dinas Kelautan dan Perikanan, 2024

Gambar diatas merupakan persyaratan para nelayan untuk mendapatkan subsidi minyak solar untuk mendaftarkan ke dinas Kelautan dan Perikanan dan Kepala Desa. maka dari itu hasil

wawancara dari informan staf dinas Kelautan dan Perikanan pada tanggal 22 Mei tahun 2024 mengatakan bahwa :

*“Manajemennya harus ada persyaratan seperti berkas dokumen untuk mendaftar program subsidi solar. Koperasi sekarang terbatas kuotanya makanya harus udah ada yang tertera namanya untuk mendapatkan program subsidi solar” (hasil wawancara tanggal 22 Mei 2024).*

Pada hari yang sama juga pada tanggal 5 Mei 2024 pukul 14.00 dikediaman rumah bapak Abdullah mengatakan bahwa :

*“Saya untuk membeli solar dari agen karena kalau membeli sendiri modalnya besar juga, makanya saya membeli solarnya dari agen tidak langsung ke SPBUN” (hasil wawancara tanggal 5 Juni 2024).*

Sedangkan hasil wawancara Nasri selaku Kepala Desa Palu Sibaji mengatakan bahwa :

*“Manajemen program ini berjalan harus sesuai standart operasional prosedur (SOP) ketika para nelayan ingin mengambil surat rekomendasi dari dinas Kelautan dan Perikanan dan Kepala Desa supaya subsidi solar tepat sasaran” (hasil wawancara tanggal 20 Mei 2024).*

Beberapa jawaban diatas menggambarkan bahwa struktur organisasi masih perlu ditingkatkan statusnya karena berintas terhadap keberhasilan tugas. Tingkat organisasi yang dibutuhkan minimal kantor koperasi program subsidi solar untuk nelayan, karena dengan status juga meningkatkan kewenangan bertindak di lapangan dan tentunya dukungan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana juga dapat ditingkatkan.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan perlu ditangani secara optimal agar adanya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang tidak bertanggung jawab salah satu yang menjadi faktor pendukung kegiatan pengawasan program subsidi solar untuk nelayan berjalan secara lancar demi memanfaatkan struktur birokrasi yang memadai. Tetapi dalam standart operasional prosedurnya sudah dilakukan dan disampaikan oleh dinas perikanan dan kelautan dan pemerintah desa dalam pengambilan minyak subsidi solar, tapi peneliti setelah turun ke lapangan dan observasi peneliti mendapatkan program ini tidak tepat sasaran langsung ke nelayan, karena dalam pengambilan minyak subsidi solar di SPBUN kebanyakan agen/suplly yang mendapatkan subsidi solar minyak solar.

### **3. Kesimpulan**

Implementasi program subsidi solar pada dasarnya dapat meningkatkan pendapatan nelayan di Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang sehingga lebih sejahtera. Namun faktanya peningkatan pendapatan nelayan di Desa Paluh Sibaji belum mampu diwujudkan oleh pemerintah desa Paluh Sibaji dalam menjalankan program subsidi solar untuk nelayan dengan baik, sehingga program yang telah dibuat belum memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan belum jelas dalam wewenangnya apa yang menjadi tanggung jawab mereka.

## Referensi

### Buku:

Abidin. Zainal, Said. 2004. Kebijakan Publik, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah Adisasmita, Rahardjo, Prof. DR. H. 2015. Analisis Kebijakan Publik. Cetakan Ke-

1. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arikunto, Suharsimi dan Cepi Abdul Jabar, Safaruddin. 2009. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Alamsyah Kamal. 2016. Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. Media Citra Mandiri Press. Bandung

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua, terjemahan, Yogyakarta: UGM Press.,

Dewi Kusuma, Suluh, Dian. 2022. KEBIJAKAN PUBLIK Proses, Implementasi dan Evaluasi: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI). Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Stufflebeam. Zhang, Guili. (2017). The CIPP Evaluation Model: How to Evaluate for Improvement and Accountability. New York: The Guilford Press

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

### Jurnal/Skripsi:

Gumilar, G. G., & Nuryasin, H. (2022). Efektivitas program pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Karawang. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, 8(1), 273-284

Mahendra, B., Suprpto, S., & Barima, H. (2021). Pengaruh Program Kartu Tani Terhadap Penurunan Biaya Pupuk Pada Petani Padi. Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis, 411-420.

Munandar, T. A., & Darmawan, D. (2020). Implementasi program pemberdayaan masyarakat miskin pada komunitas nelayan tradisional untuk kesejahteraan sosial ekonomi di Lontar kabupaten Serang. Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus), 5(2).

Nainggolan, H. L., Aritonang, J., Ginting, A., Sihotang, M. R., & Gea, M. A. P. (2021). Analisis dan strategi peningkatan pendapatan nelayan tradisional di kawasan pesisir Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 16(2), 237-256.

Nugroho, V.R. (2017). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Pendapatan Nelayan Di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

Saputra, A. D., Radiah, E., & Mariani, M. (2022). Efektivitas Distribusi Pupuk Subsidi pada Tingkat Petani Padi Sawah di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Frontier Agribisnis, 6(4).

Supandi, A. F., & Efrianto, E. J. (2021). Efektifitas Nelayan Kecamatan Puger dalam Peningkatan Produktivitas Penangkapan Ikan Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI), 1(2), 85-96.

Permatasari, L., Suharso, P., & Hartanto, W. (2020). Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) pada Masyarakat Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember. JURNAL

PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 14(1), 225-231.

Rukaiyah, S. T. (2023). ANALISIS MANAJEMEN STRATEGI DALAM MENGHADAPI DAMPAK KENAIKAN BBM (STUDI KASUS NELAYAN DI KAB. MERAUKE). POMA JURNAL: PUBLISH OF MANAGEMENT, 1(1), 68-83.

Yuliarti, I., Panggabean, R., Farida, H. L., & Gulo, A. S. (2023). Analisis Kebijakan Dampak Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi untuk Nelayan. Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen, 3(1), 1-8.

Waroy, Z. F., Riani, I. A. P., & Marit, E. L. Analisis Pengaruh Harga Subsidi BBM Bensin terhadap Pendapatan Nelayan dan Harga Satuan Ikan Laut di Kota Jayapura. Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan, 1(2), 564682

**Regulasi:**

Undang – Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Di dalam Undang – Undang terdapat koperasi sebagaimana dimaksud tentang perkoperasian yang bergerak di bidang perikanan.

Peraturan presiden Repoublik Indonesia nomor 191 tahun 2014 tentang tata cara pemberian subsidi solar kepada nelayan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2013 tentang batasan pemberian subsidi dan batasan nelayan menerima subsidi minyak solar

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang penerbitan surat penerbitan untuk pembelian jenis bahan bakar minyak solar.